



Kebijakan Pokok dan Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia

Leni Nurindah Lailatul Fitriana¹, Nur Ahid², Guntur Eko Prasetyo³, Iin Daratista⁴

Pascasarjana, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri

Email: leninurindah132@gmail.com¹, Nurahid@yahoo.com², gunturekoprasetyop@gmail.com³, iindaratista@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang kebijakan pokok dan strategi implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan pokok dan strategi implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia, guna mewujudkan pendidikan yang bermutu sesuai tantangan perkembangan zaman. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka yaitu meninjau berbagai referensi sebagai penunjang dan penguat data. Hasil penelitian menyebutkan bahwa, terdapat empat kebijakan pokok di era Kurikulum Merdeka Belajar yaitu, Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Meniadakan Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Sementara itu, terdapat 5 strategi dalam implementasi Kurikulum Merdeka Belajar ini, yaitu penerapan kurikulum merdeka secara bertahap, menyediakan asesmen dan perangkat ajar, pelatihan mandiri dan sumber belajar guru, menyediakan narasumber Kurikulum Merdeka Belajar dan komunitas belajar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan pokok dan strategi implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia, merupakan bukti bahwa kurikulum bersifat dinamis. Artinya, kurikulum selalu berubah bergantung pada kebutuhan peserta didik dan tuntutan perkembangan zaman.

Kata Kunci: *Pengembangan Kurikulum, Inovasi, Kurikulum Merdeka Belajar*

Abstract

This study discusses the main policies and strategies for implementing the Free Learning Curriculum in Indonesia. This study aims to describe the main policies and strategies for implementing the Freedom to Learn Curriculum in Indonesia, in order to create quality education according to the challenges of the times. The research method used is literature review, namely reviewing various references to support and reinforce data. The results of the study stated that, there were four main policies in the Free Learning Curriculum era, namely, the National Standardized School Examination (USBN), Abolishing the National Examination (UN), Learning Implementation Plans (RPP), and Zoning Regulations for Admission of New Students (PPDB). Meanwhile, there are 5 strategies in implementing the Free Learning Curriculum, namely implementing the independent learning curriculum in stages, providing assessments and teaching

tools, independent training and teacher learning resources, providing resource persons for the Free Learning Curriculum and learning communities. So it can be concluded that the main policies and strategies the implementation of the Freedom to Learn Curriculum in Indonesia, is proof that the curriculum is dynamic. That is, the curriculum is always changing depending on the needs of students and the demands of the times.

Keywords: *Curriculum Development, Innovation, Independent Learning Curriculum*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah wadah untuk mengembangkan keterampilan serta membentuk peradaban dan karakter bangsa yang bermartabat guna mengembangkan potensi peserta didik (Sari, Hermansah, & Selegi, 2022, pp. 48-58). Pendidikan Indonesia tengah dihadapkan dengan berbagai tantangan menyambut fase Indonesia emas yaitu 100 tahun Indonesia merdeka, 2045 mendatang. Selain itu juga, adanya tantangan globalisasi pendidikan yang diprediksi terjadi pada tahun 2030. Saat ini sudah mulai tampak, globalisasi banyak membawa perubahan di segala lini kehidupan.

Keadaan tersebut diperparah oleh merebaknya pandemi akibat virus Covid-19. Hasil riset Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah menimbulkan kehilangan pembelajaran (*learning loss*) yang signifikan. Penyelenggara pendidikan harus bergerak cepat untuk berbenah, menyiapkan peserta didik sebagai generasi muda depan untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, melalui kebijakan bidang kurikulum. Kurikulum memegang peranan yang penting dalam keberhasilan pendidikan, karena pendidikan yang bermutu berawal dari kurikulum yang baik dan tepat.

Kurikulum Merdeka Belajar dirancang Kemendikbudristek guna mengatasi krisis dan berbagai tantangan perubahan zaman tersebut. Dalam kurikulum ini, guru bebas merancang strategi, metode mengajar dan menentukan materi yang diajarkan di kelas sehingga memudahkan belajar bagi peserta didik (Fujiawati, 2016, pp. 16-28). Konten materi yang dimuat lebih optimal, agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep serta menguatkan kompetensi. Berbagai kompetensi, yaitu sikap (*attitude*), pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*), harus dikembangkan untuk bekal peserta didik di masa depan (Maryam, 2018, pp. 37-51).

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana inovasi yang dilakukan pemerintah dalam Kurikulum Merdeka Belajar ini, kebijakan serta strategi implementasi dalam pendidikan. Hal tersebut penulis sajikan dalam penelitian berjudul Kebijakan Pokok dan Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka yaitu menganalisis berbagai informasi konseptual dari buku, artikel, jurnal artikel ilmiah baik nasional maupun internasional yang terpublikasi. Kajian pustaka dalam penelitian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan, terutama penelitian akademik untuk mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis (Sukardi, 2013, p. 33). Hal ini berfungsi sebagai untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi penelitian (Sujarweni, 2014, p. 57).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pokok Kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia

Kemendikbudristek melakukan terobosan dalam bidang pendidikan yaitu dengan mengembangkan Kurikulum Merdeka Belajar untuk mendorong peserta didik agar memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Pembaharuan terhadap kurikulum memerlukan landasan kuat, mengacu berdasarkan penelitian serta hasil pemikiran yang terperinci. Pembaharuan kurikulum perlu dilakukan karena kurikulum adalah sesuatu yang bersifat dinamis. Artinya, kurikulum selalu berubah bergantung pada kebutuhan peserta didik dan tuntutan perkembangan zaman.

Dalam Kurikulum Merdeka Belajar, terdapat empat kebijakan pokok yang dicanangkan Kemendikbudristek, yaitu: Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), meniadakan Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Adapun penjelasan lebih rinci mengenai empat pokok kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

Pada tahun 2020, pemerintah menentukan arah kebijakan mengganti pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dengan asesmen dan hanya diselenggarakan oleh sekolah. Kompetensi siswa dapat dinilai melalui tes tertulis maupun bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif (Mauzdati, 2020, pp. 315-320). Penyelenggaraan USBN diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Sekolah mendapat kebebasan menyelenggarakan ujian, sementara pemerintah dapat memonitor dan mengevaluasi jalannya pelaksanaan USBN serta memastikan kualitas pelaksanaan ujian yang diselenggarakan sekolah. Dengan adanya kebijakan baru ini, guru akan lebih merdeka dalam menilai siswa.

2. Meniadakan Ujian Nasional (UN)

Ujian Nasional (UN) terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2020. Dan pada tahun 2021, UN digantikan dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survey Karakter. Asesmen Kompetensi Minimum ini diikuti oleh siswa kelas 4, 8 dan 11. Adapun muatan AKM meliputi kemampuan Literasi, Numerasi dan Karakter. Dalam prakteknya, pelaksanaan AKM ini mengacu pada standar pendidikan internasional PISA dan TIMSS. Hasilnya dari AKM ini dijadikan sebagai bahan

evaluasi pendidikan dan menjadi patokan bagi lembaga pendidikan untuk memperbaiki proses pembelajaran (Uswatiah, Masruroh, & Argaeni, 2021, pp. 27-40). Sehingga, harapannya dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Kemendikbudristek juga mengeluarkan kebijakan aturan pembuatan RPP. Aturan tersebut meliputi format, komponen dan durasi penulisan RPP. Guru diberikan kebebasan memilih dan mengembangkan format RPP. Namun, ada 3 komponen inti yang harus tercantum di dalam RPP, yaitu tujuan, kegiatan pembelajaran dan penilaian, yang dapat disajikan dalam 1 halaman. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) hanya 1 halaman. Penulisan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dilakukan dengan efisien dan efektif (Asfiati & Mahdi, 2020, pp. 59-69). Kemendikbudristek juga menegaskan bahwa, hal tersebut diterapkan agar lebih fokus pada kualitas pembelajaran dan pendidikan, dengan tidak terbebani oleh perlengkapan administrasi.

4. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi adalah kebijakan penerimaan siswa baru sesuai dengan lokasi daerah masing-masing. Zonasi ini tidak hanya mengatur pemerataan kualitas sekolah dan siswa, tetapi juga menitikberatkan pada kuantitas dan kualitas guru di suatu daerah yang nantinya akan menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah (Baro'ah, 2020, pp. 1063-1073). Arah kebijakan ini juga bertujuan agar PPDB lebih fleksibel dan bisa mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Setiap daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan wilayah zonasi masing-masing dan proposinya. Namun, secara garis besar proporsi yang ditentukan oleh pemerintah yaitu: Jalur zonasi minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, jalur perpindahan maksimal 5%, dan jalur prestasi (0-30%).

Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia

Kurikulum Merdeka belum diimplementasikan secara serentak. Kebijakan yang diberikan oleh Kemdikbudristek yaitu membentuk sekolah percontohan untuk mengimplementasikannya sesuai tingkat kesiapannya. Sekolah yang siap atau ingin menerapkan Kurikulum Merdeka diharuskan mempelajari materi konsep Kurikulum Merdeka yang telah disiapkan Kemendikbudristek.

Selanjutnya, sekolah melakukan pendaftaran dan mengisi survei singkat sebelum akhirnya memutuskan untuk mencoba menerapkan Kurikulum Merdeka. Implementasi Kurikulum Merdeka tidak dilakukan berdasarkan seleksi, melainkan melalui pendaftaran dan pendataan. Kunci keberhasilan Kurikulum Merdeka, salah satunya terletak pada kesediaan kepala sekolah dan guru dalam mengadaptasi dan memahami kurikulum Merdeka. Kemendikbudristek juga telah menyiapkan skema strategi implementasi Kurikulum Merdeka, yaitu:

1. Strategi pertama

Strategi ini fokus pada kesiapan sekolah untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, yakni rute adopsi kurikulum merdeka dilakukan secara

bertahap. Pendampingan analisis kesiapan sekolah dilakukan berkala setiap 3 bulan dengan memberikan umpan balik. Hal tersebut dilakukan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memetakan kebutuhan penyesuaian dukungan Implementasi Kurikulum Merdeka.

2. Strategi kedua

Strategi ini berfokus pada penyediaan pilihan penilaian dan alat pengajaran berbasis TIK. Sebagai contoh: Buku pelajaran, modul ajar, proyek, media dalam bentuk digital.

3. Strategi ketiga

Strategi ini menitikberatkan pada pelatihan mandiri kurikulum merdeka dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Pelatihan berbasis teknologi ini memungkinkan guru untuk mengaksesnya secara *online*. Hal ini tentu saja memudahkan lembaga pendidikan untuk mengadopsi kurikulum mandiri. Kemendikbud juga telah menyiapkan berbagai video edukasi, *podcast*, atau buku elektronik yang telah didistribusikan di berbagai media. Strategi kedua dan ketiga lebih menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi dalam implementasi kurikulum mandiri. Teknologi juga semakin berkembang pesat. membawa dampak yang sangat signifikan bagi berbagai sektor kehidupan termasuk pendidikan (Nasori, Putra, Nurmala, & Dwijayanti, 2022, pp. 97-106). Di masa pandemi Covid-19, teknologi berperan sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Keberadaan teknologi ini menjadi jembatan, baik dari sisi teknis pelaksanaan maupun sumber belajar, agar pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring berlangsung dengan baik (Churiyah, Sholikhah, Filianti, & Sakdiyah, 2020, pp. 491-507).

4. Strategi keempat

Strategi ini fokus pada penyediaan sumber daya manusia yang kompeten pada lembaga pendidikan. SDM ini berasal dari sekolah penggerak/SMK PK yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka. Strategi ini dapat diimplementasikan secara langsung atau *online* melalui webinar, seminar tatap muka, lokakarya, atau pertemuan lainnya.

5. Strategi kelima

Strategi ini menekankan pada pemanfaatan komunitas belajar yang dibentuk atas prakarsa alumni guru dan pelatih di guru penggerak. Dengan strategi tersebut diharapkan dapat menjadi wadah pertukaran praktik-praktik yang baik dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Komunitas belajar dapat menciptakan ruang pertukaran dan keterbukaan dalam pelaksanaan pembelajaran. Strategi keempat dan kelima merupakan strategi yang lebih menitikberatkan pada pertemuan, baik pertemuan yang menghadirkan narasumber maupun komunitas belajar. Menciptakan ruang terbuka antara guru, siswa dan peneliti ketika melakukan kegiatan pembelajaran, termasuk implementasi Kurikulum Merdeka secara bersama, hal ini dapat dicapai melalui keterlibatan masyarakat (Mutiani, Abbas, Syaharuddin, & Susanto, 2020, pp. 113-122).

KESIMPULAN

Kebijakan pokok dan strategi implementasi Kurikulum Merdeka Belajar ini digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, diketahui pula bahwa dalam prakteknya, kebijakan pokok Kurikulum Merdeka Belajar mengacu pada standar pendidikan Internasional PISA dan TIMSS dan menjadi patokan bagi lembaga pendidikan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kurikulum Merdeka Belajar akan dilaksanakan secara bertahap dan tidak terburu-buru agar dapat mengukur kesiapan satuan pendidikan untuk menerapkan Kurikulum Merdeka. Selain itu, strategi implementasi Kurikulum Merdeka Belajar pasca pandemi Covid-19 juga harus diperhatikan, agar dapat dilakukan secara tepat guna mengatasi krisis pembelajaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan pokok dan strategi implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia, merupakan bukti bahwa kurikulum bersifat dinamis. Artinya, kurikulum selalu berubah bergantung pada kebutuhan peserta didik dan tuntutan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Asfiati, & Mahdi, N. I. (2020). Merdeka Belajar bagi Anak Kebutuhan Khusus di SLB Kumala Indah. *KINDERGARTEN: Journal of Islamic Early Childhood Education*, 59-69.
- Baro'ah, S. (2020). Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Strategi Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Strategi. *Jurnal Tawadhu*, 1063-1073.
- Churiyah, M., Sholikhah, Filianti, & Sakdiyyah, D. A. (2020). Indonesia Education Readiness Conducting Distance Learning in Covid-19. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 491-507.
- Fujiawati, F. S. (2016). Pemahaman Konsep Kurikulum Dan Pembelajaran Dengan Peta Konsep Bagi Mahasiswa Pendidikan Seni. *Jurnal Pendidikan dan Kajian Seni*, 16-28.
- Maryam, S. (2018). Progressive Interview Learning Model As Innovation In Improving Students' Literacy. *International Journal of Language and Literature*, 37-51.
- Mauizdati, N. (2020). Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Perspektif Sekolahnya Manusia Dari Munif Chatib. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 315-320.
- Mutiani, Abbas, E. W., Syaharuddin, & Susanto, H. (2020). Membangun Komunitas Belajar Melalui Lesson Study Modeltranscript Based Learning Analysis. *HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 113-122.
- Nasori, A., Putra, I., N. s., & Dwijayanti, N. S. (2022). Challenges Digital Literacy in Era of Society 5.0 : Effectiveness Problem Based Learning With Mobile Learning to Acceleration Digital Mobile Learning to Acceleration Digital. *Journal On Teacher Education (JOTE)*, 97-106.
- Sari, D., Hermansah, B., & Selegi, S. F. (2022). Efektivitas Penggunaan Media Permainan Tradisional Congklak terhadap Kemampuan Berhitung Siswa

pada Pembelajaran Matematika Kelas 1 SD Negeri 87 Palembang. *Journal On Teacher Education (JOTE)*, 48-58.

Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sukardi. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Uswatiyah, W., Masruroh, & Argaeni, N. (2021). Implikasi Kebijakan Kampus Merdeka Belajar terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Menengah Serta Pendidikan Tinggi. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 27-40.